KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Taufik: jadikan opini BPK sebagai acuan pengalokasian anggaran K/L
Tanggal : Rabu, 04 Oktober 2017
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

IHPS Dan LHP Bukan Laporan Administratif

Taufik: Jadikan Opini BPK Sebagai Acuan Pengalokasian Anggaran K/L

Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan (kedua kiri) didampingi Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (kiri) menerima IHPS I Tahun 2017 dari Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara.

DPR mendorong Ikthisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2017 dijadikan acuan pengalokasian anggaran Kementerian atau Lembaga (K/L). Hasil kerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu tak boleh dijadikan sekadar laporan rutin atau laporan administratif pengeloaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

WAKIL Ketua DPR, Taufik Kurniawan meminta, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menggunakan IHPS sebagai dasar pengalokasian anggaran K/L. Menurutnya, pengalokasian keuangan terhadap seluruh K/L harus disesuaikan dengan kinerja dan opini yang diberikan oleh BPK, agar mekanisme reward and punishment pengeloaan anggaran dapat berjalan.

"Jangan sampai, kementerian atau lembaga yang mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau Disclaimer Opinion diberi anggaran lebih. Jangan juga, Kementerian atau Lembaga yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) disamakan dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)," kata Taufik usai memimpin Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Sebagai bendahara negara, lanjut dia, Kemenkeu tak boleh menjadikan IHSP sekadar laporan rutin atau laporan administratif pengeloaan APBN. Terlebih, DPR telah berkomitmen untuk meneruskan dan menindaklanjuti hasil kerja BPK itu kepada seluruh Alat Kelengkapan Dewan (AKD) atau komisi terkait.

"Dalam konstitusi, BPK wajib meyampaikan IHPS kepada DPR. Tapi, aturan itu tak boleh dijadikan sekadar laporan rutin. Setiap komisi perlu menindaklanjuti IHPS kepada seluruh mitra kerja. Dengan begitu, pengawasan yang dilakukan komisi lebih optimal, bukan sekedar rutinitas," tegas Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan itu.

Sebelumnya, Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara mengungkapkan, pihaknya menemukan 14.997 permasalahan senilai Rp 27,39 triliun dalam pemeriksaan semester I tahun 2017. Menurutnya, permasalahan tersebut meliputi kelemahan sistem pengendalian intern (SPI), ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan senilai Rp 25,14 triliun, serta permasalahan ketidakhematan dan ketidakefisien senilai Rp 2,25 triliun.

"ketidakpatuhan mengakibatkan kerugian senilai Rp 1,81 triliun, potensi kerugian senilai Rp 4,89 triliun, serta kekurangan penerimaan senilai Rp 18,44 triliun. Pada saat pemeriksaan, entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah Rp 509,61 miliar," ujar Moermahadi dalam Rapat Paripurna DPR dengan agenda penyerahan IHPS I Tahun 2017 kepada DPR, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, kemarin.

Ia menuturkan, IHPS I tahun 2017 merupakan ringkasan dari 687 LHP yang terdiri atas 645 LHP keuangan, 9 LHP kinerja, dan 33 LHP dengan tujuan tertentu. Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016, kata dia, mayoritas K/L telah memperoleh opini WTP. Sebanyak 74 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) atau 84 persen telah memperoleh opini WTP.

"Capaian ini mulai mendekati target Sasaran Pokok Pembangunan Tata Kelola dan Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2019, yakni sebesar 95 persen. Sebanyak 8 LKKL (9 persen) memperoleh opini WDP, dan 6 LKKL memperoleh pini TMP atau Disclaimer Opinion. Namun, indeks opini atas capaian tingkat perolehan opini WTP pada pemeriksaan tahun 2017 masih di bawah target bidang Reformasi Keuangan Negara yang ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019," jelas dia. ■ TIM/ONI